

Judul : Pansus Haji cium indikasi korupsi  
Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 3

# Pansus Haji Cium Indikasi Korupsi

*Hari ini, pansus meminta persetujuan Rapat Paripurna DPR untuk bekerja pada masa reses.*

SRI UTAMI  
[ami@mediaindonesia.com](mailto:ami@mediaindonesia.com)

**P**ANITIA Khusus (Pansus) DPR RI untuk Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 menduga ada tindak pidana korupsi dalam pengalihan kuota tambahan jemaah haji reguler ke jemaah haji khusus.

Informasi itu akan dikuak dalam kerja Pansus Haji yang direncanakan tetap berlangsung kendati dewan sudah memasuki reses besok. Hari ini, Pansus

Haji meminta persetujuan Rapat Paripurna DPR untuk bekerja pada masa reses.

Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah mengatakan pansus bertekad membongkar kotak pandora pengalihan 50% tambahan kuota haji reguler ke kuota haji khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Pasal 64 ayat 2, jatah kuota haji khusus hanya 8% dari keseluruhan kuota haji Indonesia.

"Ada informasi yang kami terima bahwa pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi ada korupsi. Kami akan dalam dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal

ini nanti," ungkap Luluk, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Pansus dibentuk untuk menindaklanjuti temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain pelanggaran UU dan indikasi korupsi, Timwas DPR melaporkan beberapa persoalan layanan, khususnya di masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Persoalan itu antara lain penggunaan tenda yang melebihi kapasitas hingga toilet yang tidak memadai. Timwas menilai

ada kesepakatan yang tidak sempurna dengan pihak masyarakat atau perusahaan Arab Saudi yang menyediakan layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Anggota pansus yang juga anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya Adi Putra mengatakan pansus akan memanggil Kementerian Agama (Kemenag) untuk menanyakan langsung data dan informasi yang diterima tim terkait dengan kesengkarutan pelaksanaan ibadah haji.

Wisnu mengakui pimpinan DPR mempertimbangkan untuk menunggu proses haji yang rampung pada 23 Juli. Namun, tim yang terdiri dari lintas komisi tersebut menilai itu terlalu lama.

"Pansus sudah banyak temuan data. Besok (hari ini) finalisasi dalam rapat paripurna

untuk (meminta persetujuan) kami mengungkap ini di masa reses. Keputusannya besok," ungkap Wisnu, kemarin.

## Fokus kepulangan

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief kerja Pansus Haji. Ia mengaku masih fokus mengurus kepulangan jemaah haji ke Tanah Air.

"Saya masih mengurus dulu kepulangan jemaah. Masih puluhan ribu orang. Kurang elok saya saat ini bicara pansus," ujar Hilman melalui pesan singkat kepada Media Indonesia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempersilakan pansus DPR

bekerja untuk menginvestigasi hasil temuan pengawasan. "Enggak masalah (ada Pansus Haji). Memang kewenangan DPR itu melakukan hasil pengawasannya. Pengawasan itu kemudian memerlukan adanya investigasi selanjutnya."

Sebelumnya, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai Pansus Haji bakal layu sebelum berkembang. Alasannya, DPR sudah memasuki masa reses, sedangkan dalam beberapa bulan ke depan pemerintahan dan DPR sudah akan berganti.

Mustolih juga berpendapat tidak ada pelanggaran karena menteri agama berwenang mengatur pembagian tambahan kuota haji yang tahun ini sebanyak 20 ribu jemaah. (Fah/Boh/X-10)